

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVERNING (Studi Kasus Pada Kota dan Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017)

Neilis Sa'Adah, Abdul Rohman¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study intends to analyze the effect of Capital Expenditures on the growth of financial performance with Regional Original Income as an intervening variable. In connection with these problems the following hypothesis is proposed: Capital Expenditures affect Regional Original Revenue, Regional Original Revenues have an effect on Growth of Financial Performance, Capital Expenditures have an effect on Growth Financial Performance and Capital Expenditures have an effect on Growth of Financial Performance through Regional Original Income as an intervening variable. In line with these problems and hypotheses, the population of this study is the Realization of Budget Revenue Expenditures in the Regency / City in Central Java Province in 2015-2017 and as a sample of Capital Expenditures, Original Regional Revenues, and variables that are parameters for measuring the financial performance of the Regency / City in Central Java Province. The data used is secondary data, to get more accurate data, the method used is documentation. The analytical method used is descriptive statistics, outer model test and inner model test. Capital Expenditures have a positive and significant effect on Regional Original Revenue, Regional Original Income has a positive and significant effect on Growth of Financial Performance, Capital Expenditures significantly have a direct positive effect on Growth of Financial Performance and Capital Expenditures significantly indirectly has a positive effect on Growth of Financial Performance with Regional Original Income as an intervening variable.

Keywords: Capital Expenditures, Regional Original Revenue, Financial Performance, Agency theory

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu titik fokus yang penting guna memperbaiki kesejahteraan warga negara. Pengembangan pada suatu wilayah daerah mampu disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan suatu daerah masing-masing. Di Indonesia Undang-undang No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004 memaparkan bahwa “pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Menurut UU tersebut pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. “Pengelolaan keuangan daerah yang baik tentunya diharapkan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah” (Puspitasari, 2015). Pengelolaan yang baik dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

Otonomi Daerah ini menjadi kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Salah satu penilaian dalam pengelolaan anggaran dikatakan baik adalah melalui penilaian kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja pada suatu organisasi yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang

¹ Corresponding author

mewakili realitas atau mewakili kondisi pada suatu organisasi. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah tersebut dalam hal pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Halim (2007) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan atau tidak dalam kinerja keuangan maka dapat dilakukan analisis keuangan terlebih dahulu, setelah mengetahui hasilnya maka dapat diketahui juga kinerja keuangan perusahaan tersebut dikatakan baik atau buruk. Dalam organisasi pemerintah untuk mengatur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan pertumbuhan (Sularso dan Restianto, 2011).

Dalam era desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka pembangunan daerah diserahkan kepada pemda seluas luasnya. Pembangunan fiskal adalah salah satu wujud upaya peningkatan pelayanan publik pemerintah daerah. Pembangunan daerah dapat berupa pembangunan fiskal yaitu pembangunan fisik meningkatkan sarana prasarana dan infrastruktur suatu daerah. pembangunan dimasukkan pada pos belanja, khususnya belanja modal. Alokasi belanja modal dibentuk melalui proses penyusunan anggaran. Tentunya dalam pengalokasian belanja modal sebagai pendukung proses pembangunan peran penganggaran sangatlah signifikan. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesat pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan

Dengan berkembang pesatnya pembangunan yang bersumber dari alokasi modal diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan terutama dalam hal keuangan. Menurut Halim dan Muhammad (2014:147), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut.

Setiap daerah memiliki potensi fiskal dan kemandirian daerah yang berbeda-beda. Selain itu otonomi daerah juga tidak hanya diperuntukan untuk suatu provinsi namun juga suatu Kabupaten dan Kota. Selain tingkat kemampuan dan tingkat kemandirian setiap daerah berbeda, karakteristik setiap daerah dan pembangunan setiap daerah dan keunikan suatu daerah yang berbeda dari satu yang lainnya merupakan suatu alasan untuk melakukan penelitian yang melihat bagaimana belanja pembangunan terhadap kinerja keuangan pada setiap daerahnya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel interverning pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2015 sampai 2017.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Meningkatnya belanja modal mengakitbatkan semakin tinggi pula produktivitas perekonomian dalam hal ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, pemerintah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayanan publik yang bersumber dari dana yang telah dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pemerintah daerah secara terus-menerus dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangannya.

BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Suatu daerah dalam upaya menambah aset tetap daerahnya yang dapat dicapai dengan pembangunan infrastruktur sebagai sarana pelayanan publik. Maka dari itu pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam anggaran pendapatan belanja daerahnya. Sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan kepada masyarakatnya yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun pihak pemerintah untuk pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pengalokasian belanja modal secara tepat dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian yang lebih banyak pada belanja modal nantinya dapat membantu masyarakat dalam pembangunan dan juga diharapkan diperolehnya sumber-sumber keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah (D. N. Yulia Astiti, 2016).

H1: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi kebutuhannya, dan memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adanya potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah

BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Sarana infrastruktur yang dibangun untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan didanai oleh belanja modal. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah (Harianto & Adi, 2007).

H3: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah

BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Menurut Mahmudi (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya. Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas

peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah (Adi, 2007).

H4: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

1. Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan \& Mesin} + \text{Belanja Gedung \& Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}$$

2. Pertumbuhan Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan didalamnya. Kinerja keuangan adalah menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang digunakan adalah rasio dan indeks, yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan yang lain.

Selain menggunakan parameter rasio keuangan pemerintahan daerah dari hasil penelitian terdahulu, analisis Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini juga memakai analisa kinerja keuangan yang telah dikembangkan oleh Musgrave, Richard A dan B. Musgrave, Peggy dalam bukunya "*Public Finance in Theory and Practice*". (Hadiprojo) Namun dalam penerapannya, parameter disesuaikan dengan komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu :

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

2. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Belanja Rutin Non Pegawai}}$$

3. Rasio Kemampuan Mobilisasi Daerah

Kemampuan Mobilisasi Daerah merupakan kemampuan daerah untuk bergerak secara bebas, mudah dan teratur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas guna mempertahankan daerah.

$$\text{Rasio Mobilisasi Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pajak Daerah}}$$

4. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi penggunaan anggaran menurut Mardiasmo (2009) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Sisa Anggaran}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

5. Rasio Sisa Perhitungan Anggaran

Sisa anggaran (Sisa Perhitungan Anggaran) merupakan selisih lebih antara penerimaan daerah atas belanja yang dikeluarkan dalam satu tahun anggaran ditambah selisih lebih transaksi pembiayaan penerimaan dan pengeluaran (Nugroho, & Rohman, 2012), yaitu:

$$\text{Sisa Perhitungan Anggaran} = \frac{\text{Total Pengeluaran Lainnya}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan} + \text{Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah}$$

Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus adalah merupakan metode pengambilan seluruh kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah hanya 33 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah karena keterbatasan pengolahan pada aplikasi SmartPLS yang hanya menyarankan maksimal 100 data. Data yang dihilangkan 2 kabupaten dipilih secara acak/*random*.

METODE ANALISIS

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, pengujian *outer model*, pengujian *inner model*, dan uji hipotesis

Statistik Deskriptif yang dimaksud untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah kinerja keuangan, PAD, dan belanja modal. Uji statistik deskriptif bertujuan untuk melihat distribusi data dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah *Partial Least Square (PLS)*. Partial least square merupakan metode analisis yang powerful karena tidak didasarkan banyak asumsi, ukuran sampel yang digunakan tidak harus besar, dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). PLS dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori dan menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten (Ghozali, 2011).

Outer Model

Convergent validity digunakan untuk menilai seberapa besar korelasi antar pernyataan dengan konstraknya (F. Hair, 2014). Validitas konvergen dapat dinilai dari nilai *loading factor*, *communality* dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)*. Rule of thumb yang digunakan untuk validitas konvergen adalah *loading factor* >0,7, *communality* >0,5 dan *Average Variance Extracted (AVE)* >0,5 (F. Hair et al., 2014). *Discriminant validity* merupakan penilaian seberapa berbeda suatu konstruk dengan konstruk lainnya, yaitu diukur dengan membandingkan nilai AVE dari kedua konstruk dengan nilai kuadrat korelasi antara dua konstruk yang diuji tersebut. Validitas diskriminan dapat dilihat melalui *cross loading* pengukuran dengan konstraknya, yaitu masing-masing indikator yang ada dalam suatu konstruk memiliki perbedaan dengan indikator di konstruk lain yang ditunjukkan dengan nilai *loading* yang lebih tinggi di konstraknya sendiri (Gefen, 2005).

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur akurasi, konsistensi dan ketepatan alat ukur dalam melakukan pengukuran (F. Hair et al, 2014). Uji reliabilitas dapat menggunakan nilai *cronbach alpha* dan nilai *composite reliability*. Menurut Chin dalam Jogiyanto (2011), *cronbach alpha* digunakan untuk mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan *composite reliability* digunakan untuk mengukur nilai reliabilitas sesungguhnya suatu konstruk. Nilai *composite reliability* dan nilai *cronbach alpha* masing-masing konstruk harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima (Hair et al, 2010).

Inner Model

Pengujian model struktural (inner model), dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk laten (pengujian hipotesis). Menggambarkan hubungan antara variabel laten yang ada pada model penelitian. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik resampling dan bootstrapping. Pengaruh antar variabel dianggap signifikan pada tingkat 5% jika nilai t statistik hasil analisis data lebih besar dari t tabel. Uji hipotesis dengan melihat *Estimate for Path Coefficients* merupakan nilai koefisien jalur atau besarnya hubungan/pengaruh konstruk laten. Pada penelitian ini menggunakan 99 sample sehingga Nilai signifikan yang digunakan (one tailed) t-value atau nilai t tabel yang digunakan 1,660 (signifikan 5%). Sehingga dalam penelitian ini hipotesis dapat diterima jika memiliki t statistik atau t hasil analisis pada tabel *Path Coefficient output SmartPLS 3* lebih besar dari t-tabel yaitu 1,660.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus adalah merupakan metode pengambilan seluruh kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah hanya 33 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah karena keterbatasan pengolahan pada aplikasi SmartPLS yang hanya menyarankan maksimal 100 data. Data yang dihilangkan 2 kabupaten dipilih secara acak/random.

Deskripsi Variabel

Analisis deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dari 33 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data gabungan selanjutnya diperoleh sebanyak $33 \times 3 = 99$ data. Distribusi statistik deskriptif untuk masing-masing variabel terdapat pada tabel 4.1.

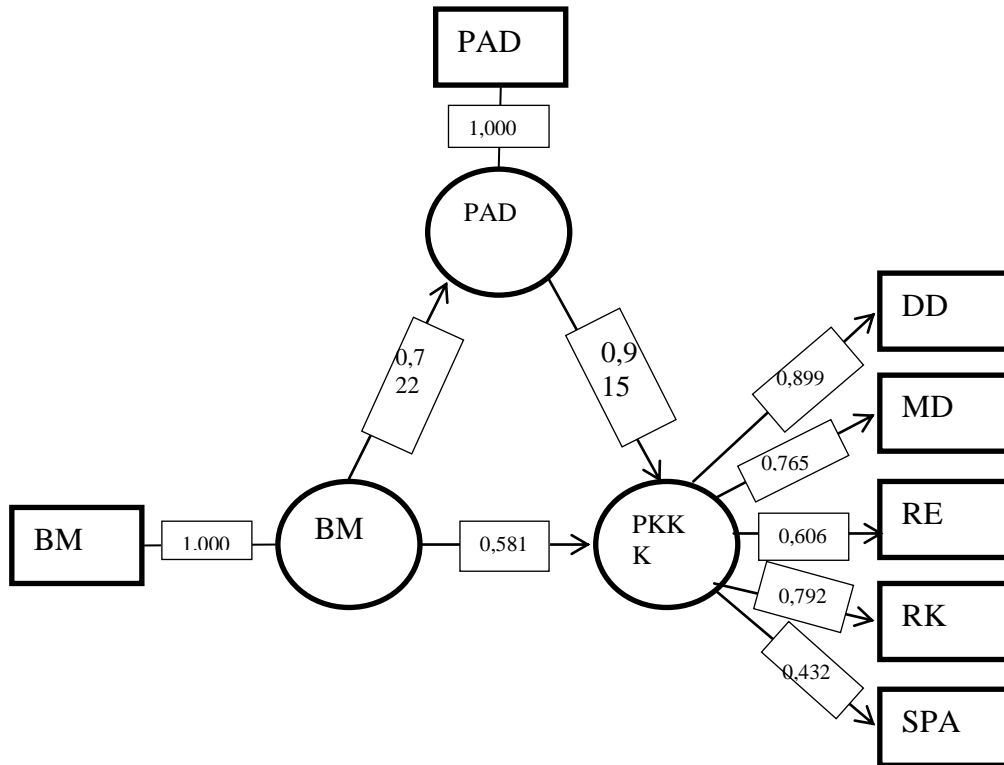
Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	Belanja Modal	PAD	Derajat Desentralisasi	Rasio Kemandirian	Mobilisasi Daerah	R Efisiensi	SPA
Max	1274940532 901,000	17918748337 69,000	0,452	2,116	0,687	0,500	0,068
Min	5198072701 9,000	11238341298 9,000	0,080	0,175	0,115	0,023	0,000
Mean	3854362120 63,950	35218173418 4,678	0,184	0,906	0,289	0,137	0,012
Standar Deviasi	2184239530 46,164	27797166271 9,269	0,086	0,359	0,151	0,092	0,012

Sumber: Data sekunder yang diolah 2019

Pembahasan Hasil Penelitian

Gambar 4.1
Hasil Olah PLS



Outer Loadings

Berdasarkan gambar 4.1, dapat dilihat bahwa beberapa indikator memiliki nilai weight yang signifikan yakni nilai weight untuk Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan nilai Derajat Desentralisasi, Mobilisasi Daerah, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Sisa Pengeluaran Anggaran tidak signifikan pada nilai weight sehingga menurut Ketchen (2013) jika terdapat nilai weight yang tidak signifikan, dapat dilakukan pengujian untuk nilai outer loading. Dalam penilaian outer loading indikator dapat dinyatakan valid jika memiliki nilai >0,5, sehingga setelah melihat nilai dari outer loading Derajat Desentralisasi, Mobilisasi Daerah, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Sisa Pengeluaran Anggaran menjadi signifikan dan dapat digunakan untuk penelitian.

Oleh karena terdapat nilai weight dan loading yang tidak signifikan pada beberapa indikator, menurut Ulum, Ghozali, dan Chariri (2008) masih dapat digunakan jika nilai mendekati

signifikan, sehingga indikator tetap dapat digunakan dalam penelitian, terlebih menurut kaidah rule of thumb Ketchen (2013) indikator tetap dapat digunakan jika tidak terjadi multikolinearitas yang dilihat dalam nilai VIF. Dengan demikian, secara keseluruhan indikator valid untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Reabilitas

Disamping uji validitas konstruk, dilakukan juga uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan composite reliability dan cronbach's alpha dari blok 59 indikator yang mengukur konstruk. Berikut ini adalah hasil pengujian composite reliability dan cronbach's alpha dari Smart PLS:

Tabel 4.2
Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Belanja Modal	1,000	1,000
Pendapatan Asli Daerah	1,000	1,000
Pertumbuhan Kinerja Keuangan	0,761	0,836

Sumber: Output SmartPLS, data sekunder yang diolah 2019

Konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki nilai composite reliability di atas 0,70 dan cronbach's alpha di atas 0,60. Dari hasil output SmartPLS di atas semua konstruk memiliki nilai composite reliability di atas 0,70 dan cronbach's alpha di atas 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Inner Model

Inner loadings merupakan pengujian terhadap model struktural sebagaimana dihipotesiskan. Pengujian mengenai inner loadings menunjukkan pengujian terhadap hubungan masing-masing variable laten yang dihipotesiskan. Nilai t yang signifikan menunjukkan hasil pengujian inner model. Terdapat 3 pengujian inner model yang diuji dalam penelitian ini. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.6
Inner Loadings

	Original sample estimate	Mean of subsamples	Standard Deviation	T-Statistic	Keterangan
BM→PAD	0,722	0,695	0,098	7,362	Baik
BM→PKK	-0,581	-0,573	0,090	6464	Baik
PAD→PKK	0,915	0,871	0,229	4,000	Baik

Sumber: Output SmartPLS, data sekunder yang diolah 2019

Hasil pengolahan dengan menggunakan SmartPLS dapat dilihat pada Tabel diatas diperoleh nilai inner model atau korelasi antara konstruk dengan variabel yang secara umum sudah cukup mendukung konsep pengukuran masing-masing variable karena memiliki nilai loading faktor (sample estimate) di atas 0,50 dan memiliki nilai pengujian t di atas 1,660.

Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian telah menunjukkan bahwa pengaruh variabel Belanja modal terhadap Pendapatan asli daerah memiliki koefisien dengan arah positif dan nilai t diperoleh sebesar 7,362. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,660. Hasil tersebut mempunyai arti bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan asli daerah. Dengan demikian Hipotesis 1 diterima.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan memiliki koefisien dengan arah positif dan nilai t diperoleh sebesar 4,000. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,660. Hasil ini berarti bahwa PAD memiliki

pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dengan demikian Hipotesis 2 diterima.

3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah

Hasil pengujian telah menunjukkan bahwa pengaruh variabel Belanja modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan memiliki koefisien dengan arah negatif dan nilai t diperoleh sebesar 6,464. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,660. Hasil tersebut mempunyai arti bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan. Dengan demikian Hipotesis 3 ditolak.

4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.

Hasil pengujian *indirect* telah menunjukkan bahwa pengaruh variabel Belanja modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening terbukti memiliki koefisien dengan arah positif dan nilai t diperoleh sebesar 3,006. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,660. Hasil tersebut mempunyai arti bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening. Dengan demikian Hipotesis 4 diterima.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Dengan kata lain, nilai koefisien determinasi berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R square diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi

	R Square
Pendapatan Asli Daerah	0,522
Pertumbuhan Kinerja Keuangan	0,407

Sumber: Output SmartPLS, data sekunder yang diolah 2019

Nilai koefisien determinasi R^2 variabel Pendapatan asli daerah dapat menunjukkan nilai besar 0.522. Hasil ini mengindikasikan bahwa 52,2% variasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh Belanja modal dan selebihnya sebesar 37,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Nilai koefisien determinasi R^2 variabel Kinerja keuangan menunjukkan nilai besar 0.407. Hasil ini mengindikasikan bahwa 40,7% variasi tingkat kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh belanja modal dan Pendapatan asli daerah dan selebihnya sebesar 65,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dari analisa dan pembahasan mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan: (1) Hasil pengujian telah menunjukkan bahwa pengaruh variabel Belanja modal terhadap Pendapatan asli daerah memiliki koefisien dengan arah positif dan nilai t diperoleh sebesar 7,362. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,660. Hasil tersebut mempunyai arti bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan asli daerah. Hipotesis 1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya belanja modal maka akan mempunyai beberapa dampak positif pada periode yang akan datang seperti produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. (2) Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan memiliki koefisien dengan arah positif dan nilai t diperoleh sebesar 4,000. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,660. Hasil ini berarti bahwa PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja

Kuangan. Dengan demikian Hipotesis 2 diterima. Dengan demikian berarti menunjukkan bahwa peningkatan pada Pendapatan asli daerah dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja pemerintah daerah karena dengan meningkatnya Pendapatan asli daerah menjadikan pemerintah dapat memenuhi pembiayaan yang digunakan untuk belanja daerahnya sendiri. (3) Hasil pengujian telah menunjukkan bahwa pengaruh variabel Belanja modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan memiliki koefisien dengan arah negatif dan nilai t diperoleh sebesar 6,464. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,660. Hasil tersebut mempunyai arti bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan. Dengan demikian Hipotesis 3 ditolak. Harapan jika terbangunnya infrastruktur dapat meningkatkan pendapatan yang diterima daerah serta meningkatkan kinerja keuangan daerah ternyata tidak berjalan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya banyak korupsi. Karena semakin meningkatnya pembangunan dapat disalahkan beberapa oknum tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi. (4) Hasil pengujian *indirect* telah menunjukkan bahwa pengaruh variabel Belanja modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel interverning terbukti memiliki koefisien dengan arah positif dan nilai t diperoleh sebesar 3,006. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,660. Hasil tersebut mempunyai arti bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel interverning. Dengan demikian Hipotesis 4 diterima. Pemerintah melakukan Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkat kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak sesuai dengan teori yang digunakan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: (1) Dari 29 Kabupaten dan Kota yang diteliti memiliki potensi yang tidak sama sehingga menjadi kendala dalam laporan/informasi. (2) Penelitian ini belum menguji melalui indikator kinerja keuangan lain seperti rasio ketergantungan, efektifitas, efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio belum diteliti. (3) Riset dilakukan hanya menggunakan data sekunder laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015-2017, tanpa dilakukan konfirmasi dalam bentuk wawancara atau kuesioner untuk mengetahui kendala-kendala dalam pencapaian kinerja yang baik.

Dengan mempertimbangkan hasil analisis, kesimpulan serta keterbatasan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya dan kepada pemerintah daerah adalah: (1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah indikator perhitungan pertumbuhan kinerja keuangan yang lain diluar penelitian yang diperkirakan dapat mempengaruhi pengalokasian belanja modal dan pendapatan asli daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. (2) Pemerintah Daerah diharapkan untuk terus meningkatkan belanja modal dan penerimaan PAD dengan cara meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan PAD, serta menggali potensi-potensi PAD yang ada di daerah. Adanya peningkatan pada belanja modal dan penerimaan PAD tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan. Hal ini cukup penting mengingat PAD merupakan indikator kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya.

REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sularso, H., & Restianto, Y. E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kab./Kota di Jawa Tengah.
PP No. 71. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan.
Mahmudi. 2016. Akuntansi Sektor Publik, Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

- Harianto, D., & Hari Adi, P. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar 26-28 Juli 2007.
- Ulum, I., Ghozali, I., & Chariri, A. (2008). *Intelectual Capital dan Kinerja Keuangan : Suatu Analisis dengan Pendekatan Partial Least Square*.
- Ni Luth Puspitasari (2015). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel interverning (Studi Kasus di Kabupaten Buleleng) Ni Luh Putu Lindri Puspitasari Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha, 3(1).
- Gefen, D. (2005). A Practical Guide To Factorial Validity Using PLS- Graph : Tutorial And Annotated Example, 16(July). <https://doi.org/10.17705/1CAIS.01605>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (5th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fajar Nugroho (2012). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebgai Variabel Intervening
- F. Hair, J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. (2014). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM): An Emerging Tool for Business Research. *European Business Review*, 26, 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>